

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul : " Analisis Kinerja Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas". Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa pada pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Informan dipilih menggunakan metode "Purposive Sampling" dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Aspek Fungsi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sawangan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan peraturan yang ada. (2). Aspek Hak, Badan Permusyawaratan Desa sudah mendapatkan hak-haknya atas tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada terutama hak untuk mengawasi dan meminta keterangan, hak menyampaikan pendapat, serta hak mendapatkan biaya operasional. (3). Aspek Kewajiban, Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan kewajibannya sudah cukup baik, diantaranya mengamalkan dan memegang teguh Pancasila dengan cara membangun kehidupan demokrasi, membangun kehidupan demokrasi dengan cara musyawarah, menggali serta meyalurkan aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, menghormati nilai sosial dan adat-istiadat masyarakat desa, serta menjaga norma dan etika dalam menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan desa. Implikasi dari kesimpulan 3 aspek tersebut diatas adalah : (1). Aspek Fungsi : fungsi pengawasan kepada pemerintah desa perlu ditingkatkan lagi karena kebijakan dan kinerja pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat masih kerap terjadi ketidakadilan di masyarakat. (2). Aspek Hak : BPD perlu melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada masyarakat maupun lembaga dan pemerintah desa mengenai hak BPD dalam meminta keterangan dan menyatakan pendapat karena hak tersebut telah diatur di dalam Perda Kab. Banyumas dan hak mendapatkan biaya operasional telah diatur dalam ADD. (3). Aspek Kewajiban : kualitas dan kapasitas kinerja BPD Desa Sawangan perlu ditingkatkan lagi karena peran BPD sebagai lembaga legislatif desa yang mana kedudukan BPD sangat penting di dalam kehidupan demokrasi desa terutama dalam menyepakati dan mengesahkan Perdes.

SUMMARY

This thesis is entitled: "Analysis of the Performance of Village Consultative Council Institutions in Carrying Out Their Functions in Sawangan Village, Ajibarang District, Banyumas Regency". The method used in this study aims to explain and describe the performance of the Village Consultative Body in the government of Sawangan Village, Ajibarang District, Banyumas Regency. Informants were selected using the "Purposive Sampling" method and data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Based on the research results, it can be concluded as follows: (1). The function aspect carried out by the Village Consultative Body in Sawangan Village has been running well in accordance with existing principles and regulations. (2). In terms of rights, the Village Consultative Body has obtained its rights to its duties and functions in accordance with existing regulations, especially the right to supervise and ask for information, the right to express opinions, and the right to receive operational costs. (3). Aspects of Obligations, the Village Consultative Body in carrying out its obligations is quite good, including practicing and upholding Pancasila by building democratic life, building democratic life by means of deliberations, exploring and channeling community aspirations, prioritizing public interests over personal interests, respecting social and customary values -customs of the village community, as well as maintaining norms and ethics in establishing cooperative relationships with village social institutions. The implications of the conclusion of the 3 aspects mentioned above are: (1). Aspects of Function: the supervisory function of the village government needs to be improved again because the policies and performance of the village government in preparing development plans and also services to the community still often result in injustice in society. (2). Aspects of Rights: The BPD needs to socialize and explain to the community as well as institutions and the village government regarding the BPD's rights to ask for information and express opinions because these rights are regulated in the District Regulation. Banyumas and the right to get operational costs have been regulated in the ADD. (3). Aspects of Obligations: the quality and performance capacity of the Sawangan Village BPD needs to be improved again because of the role of the BPD as a village legislative body where the position of the BPD is very important in village democratic life, especially in approving and ratifying village regulations.